

NOTA DINAS
NOMOR 348/IA.2/PR/X/2020

Yth. : Direktur Jenderal Industri Agro
Dari : Plt. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Hal : Laporan PP-39 Triwulan III Tahun 2020 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Oktober 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan III (bulan Juli s/d September 2020) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Demikian, atas perhatian dan petunjuk Bapak Dirjen lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

TTD

Edy Sutopo

Tembusan:

1. Sesditjen Industri Agro
2. Para Kasubdit di Dit. IHHP

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN III TAHUN 2020**



**DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020**

KATA PENGANTAR

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Triwulan III Tahun 2020 ini disusun berdasarkan PP No. 39 yang berisikan pelaksanaan tugas dan hasil kinerja selama Triwulan III Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam rangka pencapaian Output Kegiatan tahun anggaran 2020.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan selama Triwulan III Tahun Anggaran 2020, juga sebagai informasi dan bahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya sehingga dapat dilaksanakan lebih baik.

Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua dalam memajukan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai aset dan Kekuatan Ekonomi serta Industri Nasional.

Jakarta, 7 Oktober 2020

Plt. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

 TTD

Edy Sutopo

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Latar Belakang Program/Kegiatan.....	11
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	12
A. Program/Kegiatan Tahun 2020	12
B. Perjanjian Kerja Tahun 2020.....	17
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	20
A. Hasil yang Telah Dicapai	20
B. Analisis Capaian Kinerja.....	23
C. Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja.....	43
D. Hambatan dan Kendala.....	45
E. Langkah dan Tindak Lanjut.....	46
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

LAMPIRAN: FORM A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Program Kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020.....	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020.....	18
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan & Realisasi Fisik Triwulan III TA 2020 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.....	21
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2020.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.....	9.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu unit di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;

- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Sebagai bagian dari Industri Nasional, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan industri nasional secara keseluruhan. Hal ini mengingat bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan industri yang mengolah hasil hutan dan perkebunan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari dalam negeri, sehingga diharapkan industri hasil hutan dan perkebunan mampu meningkatkan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri, serta mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mendorong pengembangan investasi di bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Untuk mewujudkan peran pembinaan tersebut, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai peran strategik dalam pengembangan Industri sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/9/2011, yaitu:

1. Industri Hilir Kelapa Sawit
2. Industri oleochemical dan turunannya, Biofuel, Biolube, dll
3. Industri Furniture (mebel kayu)
4. Industri Komponen Furniture
5. Industri Chip wood/particle
6. Industri Prefabricated Built of Wood
7. Industri Barang dari kayu untuk dapur
8. Industri Bingkai kayu untuk lukisan
9. Industri Peti, gelondong kabel, pallet, tong kayu.
10. Industri serbuk kayu (*wood flour*)
11. Industri perhiasan dan patung dari kayu
12. Industri Bahan bangunan dari serat kayu

13. Industri gabus dan barang-barang dari gabus
14. Industri barang-barang dari kayu lainnya
15. Industri particle board/papan partikel
16. Industri Hard/soft board (MDF)
17. Industri rotan setengah jadi
18. Industri barang jadi rotan (mebel rotan dan anyaman)
19. Industri pulp
20. Industri kertas budaya
21. Industri kertas industri
22. Industri kertas tissue
23. Industri Kertas Koran
24. Industri Kertas Khusus
25. Industri karton box
26. Industri barang-barang cetakan
27. Industri barang-barang lainnya dari kertas
28. Industri karet remah (crumb rubber)
29. Industri Minyak atsiri

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tercermin pada Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Direktorat sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan data, serta penyajian informasi di bidang industri industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dibidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan perkebunan dibantu oleh :

- a. Seksi Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
2. Sub Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya, dan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri dibidang industri kayu, rotan dan bahan alam lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya dibantu oleh:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.
 - b. Seksi pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan dan bahan alam lainnya.
3. Sub Direktorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan

industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Industri Selulosa dan Karet hulu menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri dibidang industri selulosa dan karet hulu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Selulosa Karet Hulu dibantu oleh:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,

serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri Selulosa dan Karet Hulu.

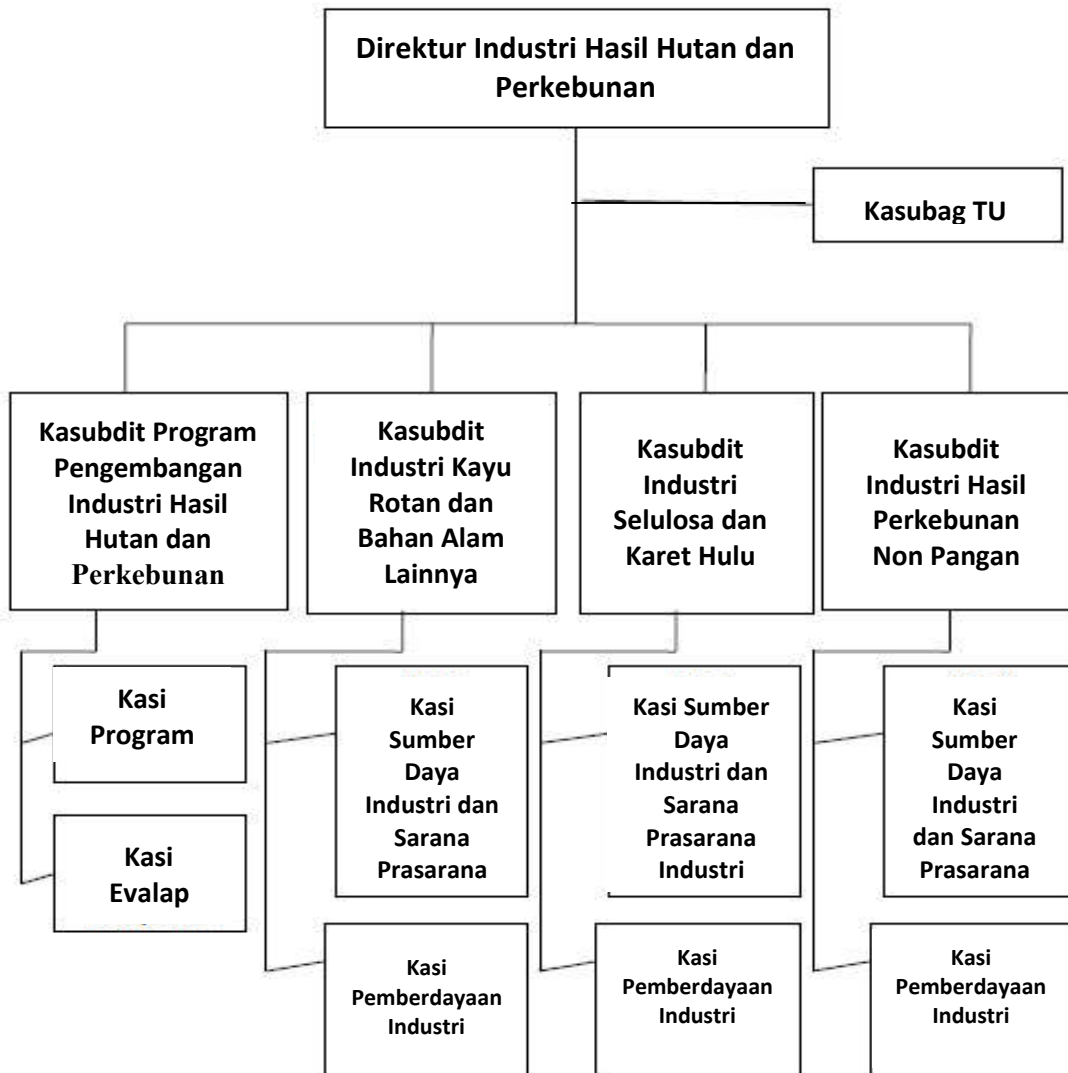
- b. Seksi pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan Industri Selulosa dan Karet Hulu.
4. Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanandan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional indonesia di bidang Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri dibidang industri Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dibantu oleh :

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana Industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.
 - b. Seksi pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.
5. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN**



C. Latar Belakang Program/Kegiatan

Tugas pokok Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Melalui tugas pokok tersebut diharapkan dengan melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan perkebunan industri tersebut tumbuh dan berkembang, selain itu bahan baku khususnya dari hasil kehutanan dan perkebunan yang tersedia cukup banyak di dalam negeri, dapat diproses lebih lanjut sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa.

Industri hasil hutan dan perkebunan memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional, yaitu terkait dengan kontribusinya dalam perolehan PDB, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan perkebunan agar tumbuh dan berkembang. Pembinaan tersebut dilakukan kedalam berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk internal Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama antara industri dengan penyediaan bahan baku dan melakukan promosi produk-produk serta berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh internal kementerian, instansi terkait, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan III Tahun 2020 ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian selama Triwulan III Tahun 2020. Selain itu laporan ini juga mengurai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun 2020

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 yang ditetapkan, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah menyusun dan mengalokasikan anggaran yang dirinci menurut Program, Kegiatan, Output dan Komponen Input.

Komponen Input yang digunakan ditetapkan dan dihitung kebutuhan anggarannya secara cermat oleh penanggung jawab kegiatan. Dimana dalam merumuskan Output (barang atau jasa yang dihasilkan) harus mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai dengan Tupoksi atau Penugasannya. Dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan IHHP 2020 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan Biro Perencanaan Kemenperin, BAPPENAS, Sekretariat Ditjen Industri Agro, Akademisi IPB, Akademisi ITB, Baristand Palembang, Balai Besar Pulp dan Kertas, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri, serta Asosiasi yang berada di bawah binaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, serta karyawan internal Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Berkaitan dengan tupoksi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) Kegiatan yaitu "Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan" yang memiliki 7 (tujuh) Output Kegiatan dengan total anggaran **Rp. 15.258.538.000,-** (Lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sejak awal bulan Maret tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi virus corona-19, sehingga diperlukan penyesuaian atas anggaran dan kegiatan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 sebesar **Rp 9.831.672.000,-** (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 64,43 persen. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan setelah dilakukan revisi adalah sebesar **Rp 5.426.866.000,-** (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Tujuh Output Kegiatan dimaksud di atas yaitu:

1) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan;

Output ini memiliki 3 (tiga) rekomendasi yang harus diselesaikan, yaitu Rekomendasi Kebijakan dan Insentif Non-fiskal dengan anggaran sebesar **Rp. 855.652.000,-**, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet.
- Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan.
- Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

2) SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Output ini memiliki 15 (lima belas) volume RSNI yang harus disusun rancangannya, yaitu: 10 RSNI produk pulp dan kertas, 3 RSNI produk furniture, dan 2 RSNI produk hilir perkebunan non pangan.

Kegiatan yang harus diselesaikan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 1.006.394.000,-**, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Rsn Selulosa Dan Karet;
- Penyusunan Rsni Furnitur Dan Pengolahan Kayu;
- Penyusunan Rsn Hilir Perkebunan Non Pangan;

3) Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Output ini memiliki 3 (tiga) volume RSKKNI yang harus disusun rancangannya, yaitu 1 RSKKNI di bidang industri Furniture dan Pengolahan Kayu, 1 RSKKNI di bidang industri selulosa dan karet, dan 1 RSKKNI di bidang industri hasil perkebunan non pangan.

Kegiatan yang harus diselesaikan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 662.091.000,-**, dengan kegiatan meliputi:

- Penyusunan RSKKNI produk pulp dan kertas
- Penyusunan RSKKNI produk furniture
- Penyusunan RSKKNI hilir perkebunan non pangan

4) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional

Output pada kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional dengan anggaran sebesar **Rp. 1.055.909.000,-** , dengan kegiatan:

- Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence.
- Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional.
- Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

5) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha

Volume Output kegiatan ini adalah 4 (empat) dokumen terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu 1 (satu) Laporan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 1 (satu) Laporan Identifikasi Isu Aktual Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 1 (satu) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja IHHP, 1 (satu) Laporan Penerapan Budaya 5K, dengan anggaran sebesar **Rp. 1.206.526.000,-** Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Penerapan Budaya 5K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

6) Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Volume output pada Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan yang ingin dicapai sebanyak 2 (dua) konsep hilirisasi, dengan anggaran sebesar **Rp. 322.994.000,-** melalui kegiatan yaitu:

- Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri.

- Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Selulosa Dan Karet.

7) Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas

Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen terkait dengan Panduan Spesifikasi Kertas Bekas sebagai bahan baku industri kertas, dengan anggaran sebesar **Rp. 317.300.000,-**. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan konsep panduan spesifikasi kertas bekas meliputi kajian dan penggalian informasi oleh konseptor terhadap industri, asosiasi, instansi pemerintah, LSM maupun stakeholder lainnya serta Penyusunan konsep panduan spesifikasi kertas bekas oleh konseptor.

Tabel II. I
Program Kegiatan Tahun 2020
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	5.426.866.000
1833	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	5.426.866.000
1833.031	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	855.652.000
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet</i>	<i>303.974.000</i>
56	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan</i>	<i>127.672.000</i>
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	<i>424.006.000</i>
1833.032	Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.006.394.000
60	<i>Penyusunan Rsnj Selulosa Dan Karet</i>	<i>461.106.000</i>
61	<i>Penyusunan Rsnj Furnitur Dan Pengolahan Kayu</i>	<i>290.032.000</i>
62	<i>Penyusunan Rsnj Hilir Perkebunan Non Pangan</i>	<i>255.256.000</i>
1833.037	Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	662.091.000
67	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu</i>	<i>317.466.000</i>
68	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Selulosa Dan Karet</i>	<i>255.069.000</i>
69	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Rskkni/kkni Industri Hasil Perkebunan Non Pangan</i>	<i>89.556.000</i>
1833.053	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional	1.055.909.000
51	<i>Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence</i>	<i>367.335.000</i>
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional</i>	<i>295.674.000</i>
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	<i>392.900.000</i>
1833.056	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.206.526.000
1	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.070.286.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	<i>391.616.000</i>
52	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	<i>296.576.000</i>
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	<i>382.094.000</i>
2	Layanan Tata Usaha	136.240.000
51	<i>Penerapan Budaya 5 K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	<i>136.240.000</i>
1833.071	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	322.994.000
1	Tanpa Suboutput	322.994.000
78	<i>Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri</i>	<i>161.376.000</i>
79	<i>Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Selulosa Dan Karet</i>	<i>161.618.000</i>

1833.072	Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas	317.300.000
51	<i>Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas</i>	317.300.000
TOTAL		5.426.866.000

B. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kerja antara pimpinan satuan kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan satuan kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPA TA. 2020. Perjanjian kinerja disusun dan ditetapkan pada awal tahun anggaran dan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ditetapkan pada bulan Januari 2020, yaitu sebagai berikut.

**Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
TUJUAN				
Tj	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,79	%
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,38	%
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3,3	Juta Orang
		4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	16,25	USD Milyar
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2,57	%
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	51,2	Juta Rupiah/ Orang /Tahun
		3. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	45,38	Rp Trilyun

SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	2,05	%
SS3	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54,75	%
		2. Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2	Diversifikasi Produk
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1. Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	9,25	%
		2. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	8,75	%
		3. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	2,23	%
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH				
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	77	Nilai

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020 Triwulan III mencakup analisis capaian kinerja yang terdiri analisis kinerja program prioritas, analisis kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan.

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran dan tujuan, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah melaksanakan kegiatan per subdit dan kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2020. Target dan realisasi pelaksanaan output dari kegiatan yang telah dilaksanakan dilaporkan capaian keuangan dan capaian fisiknya. Sasaran dan realisasi keuangan maupun sasaran dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan per Output Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat dilihat pada Form A terlampir.

Pada tahun anggaran 2020 ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **5.426.866.000,-** (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) setelah dilakukan revisi dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19. Anggaran yang terserap pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan realisasi E-Monitoring APBN dan ALKI sampai dengan Triwulan III (1 Juli s/d 30 September 2020) sebesar **Rp 2.121.414.490,-** atau sebesar **39,09 persen**, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III. 1. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Triwulan III TA. 2020
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			TOTAL	%
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	5.426.866.000	2.121.414.490	39,09
1833	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	5.426.866.000	2.121.414.490	39,09
1.833.031	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	855.652.000	367.786.620	42,98
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet</i>	303.974.000	48.786.000	16,05
56	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan</i>	127.672.000	74.269.271	58,17
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	424.006.000	244.731.349	57,72
1.833.032	Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.006.394.000	557.302.845	55,38
60	<i>Penyusunan Rsn Selulosa Dan Karet</i>	461.106.000	332.647.345	72,14
61	<i>Penyusunan Rsn Furniture Dan Pengolahan Kayu</i>	290.032.000	135.787.400	46,82
62	<i>Penyusunan Rsn Hilir Perkebunan Non Pangan</i>	255.256.000	88.868.100	34,82
1.833.037	Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	662.091.000	179.625.274	27,13
67	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu</i>	317.466.000	82.423.300	25,96
68	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Selulosa Dan Karet</i>	271.227.000	64.529.474	23,79
69	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Rskkni/kkni Industri Hasil Perkebunan Non Pangan</i>	73.398.000	32.672.500	44,51
1.833.053	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional	1.055.909.000	285.279.110	27,02
51	<i>Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence</i>	367.335.000	61.732.041	16,81
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional</i>	295.674.000	74.619.054	25,24
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	392.900.000	148.928.015	37,9
1.833.056	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.206.526.000	543.069.905	45,01
1	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.070.286.000	490.738.924	45,85
51	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	391.616.000	253.123.800	64,64
52	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	296.576.000	117.390.888	39,58

53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	382.094.000	120.224.236	31,46
2	Layanan Tata Usaha	136.240.000	52.330.981	38,41
51	<i>Penerapan Budaya 5 K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	136.240.000	52.330.981	38,41
1.833.071	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	322.994.000	100.077.290	30,98
1	Tanpa Suboutput	322.994.000	100.077.290	30,98
78	<i>Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri</i>	161.376.000	49.300.290	30,55
79	<i>Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Selulosa Dan Karet</i>	161.618.000	50.777.000	31,42
1.833.072	Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas	317.300.000	88.273.446	27,82
51	<i>Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas</i>	317.300.000	88.273.446	27,82
T O T A L		5.426.866.000	2.121.414.490	39,09

Sampai dengan triwulan III, penyerapan anggaran program kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp Rp 2.121.414.490,-** atau sebesar **39,09 persen**.

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian pelaksanaan kegiatan seperti tersebut di atas dilaksanakan melalui komponen dan subkomponen kegiatannya sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

Penurunan harga karet dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menekan kesejahteraan petani sebagai mayoritas penghasil karet alam. Beberapa faktor turut menjadi penyebab penurunan harga, terutama akibat melesunya perekonomian global, penurunan harga minyak dan terjadinya kelebihan pasokan karet di pasar dunia.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mendongkrak harga karet. Antara lain tiga negara produsen utama karet alam, yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia yang tergabung dalam organisasi *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) telah menerapkan kesepakatan pengurangan ekspor melalui Agreed Export Tonnage Scheme (AETS. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah peningkatan konsumsi karet didalam negeri melalui percepatan hilirisasinya

dimana aspal karet merupakan salah satu produk hilir yang paling potensial untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai langkah partisipatif mendukung program pengembangan infrastruktur di dalam negeri, sejak tahun 2016 telah dilaksanakan program pengembangan aspal karet melalui pembangunan Pilot Plant aspal karet pada tahun 2016, serangkaian uji gelar pada rentang waktu tahun 2016-2018, penyusunan Feasibility Study pada tahun 2017 serta penyusunan Business Plan Industri Aditif Aspal Karet Pada tahun 2018 yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dan para pemangku kebijakan terkait untuk pengembangan aspal karet di dalam negeri.

Perkembangan industri furnitur dunia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tujuh negara yang termasuk major income countries (US, Italia, Jerman, Jepang, Perancis, Kanada, Inggris) memasok 58% dari total produksi dunia. *Middle and low income countries* termasuk China, Polandia, Brazil dan Vietnam memasok 42% dari total produksi dunia. Ada tiga negara yaitu China, Polandia dan Vietnam yang mengalami peningkatan produksi sangat cepat sebagai hasil dari pengembangan investasi yang berhasil. Importir utama furniture adalah US, Jerman, Perancis dan Inggris.

Industri furnitur (kayu dan rotan) di Indonesia merupakan salah satu kelompok pada industri hasil hutan yang mempunyai nilai tambah paling tinggi. Industri ini telah ditetapkan sebagai inti pada industri pengolahan kayu. Hampir semua daerah di Indonesia terdapat industri furniture (mebel), namun konsentrasi terbesar untuk industri furniture kayu berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan untuk furniture rotan di Cirebon – Jawa Barat.

Pada tahun 2010 ekspor produk furniture Indonesia mencapai USD 1.430,57 juta. Pada tahun 2011 meningkat menjadi USD 1688,53 juta namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1.505,75, begitu pula pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 1,39 %. Nilai ekspor kembali membaik pada 2014 menjadi 1.508,66 %. Pada tahun 2015 hingga 2016, terjadi penurunan berturut-turut sebesar 2,45% dan 5,52 persen. Nilai ekspor produk furniture Indonesia mulai kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 1,77% menjadi USD 1.413,45 juta. Pada tahun 2018, nilai ini tumbuh 3,53 persen menjadi USD 1.465,24 juta. Kemudian, pada tahun 2019, ekspor produk furniture kembali meningkat sebesar

1,66 % menjadi USD 1.478,24 juta. Per Agustus 2020, nilai ekspor furniture telah mencapai USD 1.024,46 juta.

Lokus pengembangan industri furniture ditetapkan di Jawa Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi industri pengolahan kayu hilir (khususnya industri furniture) adalah masalah bahan baku (baik secara kuantitas maupun kualitas), masalah legalitas kayu, masalah SDM (terutama bidang desain dan teknik produksi, termasuk *finishing*), tuntutan sertifikasi lingkungan (termasuk ekolabel), permesinan yang sudah tua, dan lain-lain.

Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber utama energi nasional saat ini jumlahnya relatif terbatas dan semakin menipis, serta bersifat tak terbarukan (*non-renewable resources*). Menurut perhitungan, apabila Indonesia tidak menemukan sumber minyak baru, dan dengan tingkat eksplorasi seperti yang dilakukan pada saat ini, maka cadangan minyak dan gas tersebut, akan habis dalam 15 – 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan bakar nabati (biodiesel dan bioetanol) yang bahan bakunya bersifat terbarukan (*renewable resources*) yang banyak tersedia di Indonesia, seperti: tetes tebu, nira, singkong, sorgum, kelapa sawit, jarak pagar, dan lain-lain.

Sebagai bentuk partisipasi industri hasil hutan dan perkebunan pada berbagai event sidang dan pameran yang berskala internasional baik di dalam dan luar negeri. Event sidang yang dilakukan baik didalam dan luar negeri merupakan bentuk partisipasi IHHP dalam fora kerjasama internasional. Berbagai bentuk kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral pada saat ini gencar dilakukan, dalam rangka menggalang peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini merupakan bentuk respon dari perkembangan perdagangan bebas dunia yang bergerak sangat cepat berdampak pada terjadinya persaingan dagang yang semakin ketat.

Dalam merespon perkembangan tersebut, berbagai negara berusaha untuk meningkatkan daya saing produk-produk andalannya, dan pada saat yang bersamaan melakukan negosiasi dengan negara-negara mitra kerja, untuk memperlancar perdagangan antar negara. Dalam upaya mengembangkan pasar, Indonesia melakukan perundingan-perundingan dengan berbagai mitra kerja baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Perundingan-perundingan tersebut antara lain adalah dalam forum kerjasama ASEAN, forum kerjasama

negara-negara D-8, forum perdagangan dunia (WTO), forum kerjasama Tri Partit, dsb.

Sebagai konsekwensi kebijakan kerjasama bilateral dan multilateral dengan baik AFTA, ASEAN, Eropa, Australia maupun WTO, juga menyiapkan rencana kerjasama bilateral maupun multilateral dengan EROPA, AMERIKA & AFRIKA; Indonesia perlu memonitor, mencermati, mempelajari bagaimana penerimaan pasar produk-produk industri hasil hutan dan perkebunan Indonesia di luar negeri, bagaimana skema negara mitra maupun calon mitra yang sudah diterapkan terhadap produk-produk industri, utamanya produk industri olahan antara maupun hilir turunan dari komoditi hulu agro (hutan maupun pertanian). Di samping itu untuk mengikuti perkembangan dinamika bisnis internasionalterkait industri hasil hutan dan perkebunan dlm rangka mengantisipasi permasalahan yang terjadi dan memperjuangkan kepentingan industri nasional. Sebagai contoh : Sidang TPRB WTO, Sidang TBT WTO, SWGPO, UNFCCC, Green Campaign Sawit & Produk Turunannya, dll.

Industri turunan sawit dan turunan minyak atsiri sebagai bagian dari industri hasil hutan dan perkebunan (IHHP) mempunyai peranan penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Dengan peran tersebut diharapkan produk-produk IHHP mampu bersaing di pasar internasional, dan memberikan kontribusi menghasilkan devisa negara.

Output ini memiliki 3 (tiga) rekomendasi yang harus diselesaikan, yaitu Rekomendasi Kebijakan dan Insentif Non-fiskal dengan anggaran sebesar **Rp. 855.652.000,-** dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rekomendasi implementasi konsep rantai alur bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan
 - 1) Rapat fasilitasi pengembangan sistem logistik pengolahan kayu dan rotan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat
 - 2) Pembentukan kelembagaan sistem logistik kayu dan rotan nasional
 - 3) Penyusunan payung hukum sistem logistik kayu dan rotan nasional
 - 4) Pemetaan sumber bahan baku kayu dan rotan berbasis IOT
- b. Penyusunan rekomendasi implementasi industri aditif aspal karet
 - 1) Rapat koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta
 - 2) Lokakarya Sinkronisasi kebijakan Industri Selulosa dan Karet

- 3) Diseminasi Pengembang Aditif Aspal Karet
- c. Penyusunan rekomendasi insentif fiskal industri hilir kelapa sawit
 - 1) Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Hasil Perkebunan Non Pangan di Medan, Sumatera Utara
 - 2) Verifikasi/Monitoring Pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian No. 466/M-IND/Kep/8/2014 Tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri
 - 3) Menghadiri rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hilir kelapa sawit.

Akuntabilitas keuangan untuk Output I, Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan triwulan III dari yang ditargetkan 69,92 persen terealisasi sebesar 46,66 persen sedangkan dari segi realisasi fisik dari 82,53 persen yang ditargetkan terealisasi 37,54 persen.

2. SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

Output Output ini memiliki 15 (lima belas) volume RSNI yang harus disusun rancangannya, yaitu: 10 RSNI produk pulp dan kertas, 4 RSNI produk furniture, dan 1 RSNI produk hilir perkebunan non pangan.

Kegiatan yang harus diselesaikan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 1.006.394.000,-**, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan RSNI hilir perkebunan non pangan
Penyusunan/Penyempurnaan dan implementasi Rancangan Standar hilir perkebunan non pangan, 1 Judul adalah:
 - Kegiatan ini telah dilakukan dalam rangka menjaring masukan untuk penyusunan dokumen ISPO hilir minyak sawit dari stakeholder dibidang minyak sawit terutama dengan Tim kecil dari Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI).
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait baik dengan tim kegiatan di direktorat maupun dengan asosiasi dan stakeholder terkait mengenai rencana/progres kegiatan Penyusunan SNI Hilir Non Pangan

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 62,82 persen terealisasi sebesar 34,82 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 63,67 persen terealisasi sebesar 42,31 persen.

b. Penyusunan RSNI Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Tahapan komponen kegiatan pada triwulan III ini yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat Teknis I Penyusunan RSNI Furnitur pada tanggal 24-25 Agustus 2020. Acara dilaksanakan secara daring dengan agenda membahas 4 judul RSNI Furnitur.
- Koordinasi dengan PPPHH di Bogor dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Teknis II.
- Telah dilaksanakan Rapat Teknis II Penyusunan RSNI Furnitur pada tanggal 24 - 25 September 2020. Rapat dilaksanakan secara daring, dengan agenda rapat membahas 4 judul RSNI hasil dari Rapat Teknis I

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 87,92 persen terealisasi sebesar 46,82 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 98 persen terealisasi sebesar 88 persen.

c. Penyusunan RSNI Selulosa dan Karet.

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dalam rangka Penyusunan RSNI Selulosa dan Karet pada Triwulan III yang telah dilaksanakan adalah:

- Pelaksanaan penyusunan draft 2 SNI pada tanggal 2-3 Juli 2020 di BBPK.
- Rapat Teknis I RsnI Pulp dan Kertas, pada tanggal 5 Agustus 2020.
- Rapat Teknis II RsnI Pulp dan Kertas, pada tanggal 3 September 2020

Akuntabilitas keuangan untuk Output II, SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan triwulan III dari yang ditargetkan sebesar 79,39 persen terealisasi sebesar 52,63 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 84,06 persen terealisasi sebesar 72,17 persen.

Jika dibandingkan dari segi realisasi keuangan tahun 2019 periode yang sama dari yang ditargetkan 48 persen terealisasi 26,04 persen sedangkan dari segi realisasi fisik dari 25 persen yang ditargetkan terealisasi 19,26 persen.

3. Rancangan SKKNI/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Dalam rangka pembangunan tenaga kerja yang kompeten, Pemerintah Indonesia menyusun Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan dan/atau Keahlian (*skills*) serta Sikap kerja (*attitude*) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kerja yang disiapkan melalui SKKNI diharapkan dapat memiliki kemampuan terukur dan tertelusur, memiliki kompetensi, dan memiliki produktivitas kerja, dengan anggaran sebesar **Rp. 662.091.000,-**. Penyusunan RSKKNI merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan instrumen untuk memastikan peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Sasaran komponen yang ingin dicapai pada triwulan III ini adalah:

- Koordinasi ke Balai Besar Pulp dan Kertas dalam rangka penyusunan draft SKKNI industri pulp dan kertas.
- Koordinasi dengan stakeholder terkait tentang rencana kegiatan Penyusunan/revisi rancangan RSKKNI/KKNI Industri Hasil Perkebunan non pangan selama pandemi covid-19 dalam metode video conference.
- Pengumpulan data dan informasi SKKNI industri hilir atsiri sudah dilaksanakan sampai dengan periode triwulan 3 2020.
- Rapat koordinasi konsensus awal skkni hilir atsiri sudah selesai dilaksanakan pada bulan september 2020.

Akuntabilitas keuangan untuk Output III, Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun/direvisi di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan triwulan III dari yang ditargetkan 73,19 persen terealisasi 23,50 persen sedangkan dari segi realisasi fisik dari 54,21 persen yang ditargetkan terealisasi 24,76 persen.

Jika dibandingkan dari segi realisasi keuangan tahun 2019 periode yang sama dari yang ditargetkan 47,73 persen terealisasi sebesar 17,19 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 36,08 persen terealisasi sebesar 12,66 persen.

4. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional.

Output pada kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional dengan anggaran sebesar **Rp. 1.055.909.000,-**. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

- Telah dilaksanakan tahapan dalam kegiatan kajian luas penampang dan SVLK.
- Telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Penyusunan Konsep Desain Industri pada tanggal 28 Juli 2020.
- Koordinasi dengan DPD HIMKI di Cirebon dalam rangka Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu dan Rotan pada tanggal 17 - 19 Agustus 2020

Akuntabilitas keuangan untuk Output IV, Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional, jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan Triwulan III dari yang ditargetkan 73,82 persen terealisasi 27,40 persen sedangkan dari segi realisasi fisik dari 80,33 persen yang ditargetkan terealisasi 37,65 persen.

5. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha.

Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan fasilitasi-fasilitasi dan pembinaan kepada dunia usaha yang berada dibawah binaannya melalui pelaksanaan program-program. Di lain pihak, kemampuan pemerintah sangat terbatas, terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu mekanisme perencanaan program yang efektif dan terarah, melalui pelibatan asosiasi, dunia usaha, lembaga-lembaga litbang dan instansi terkait

serta perguruan tinggi, agar program-program yang disusun benar-benar efektif dan mengenai sasaran sehingga dunia usaha (industri) mampu bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat mengembangkan usahanya sebagaimana yang diharapkan, dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perolehan devisa dan kontribusi dalam pembentukan PDB. dengan anggaran sebesar **Rp. 1.206.526.000,-**. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

Sasaran komponen yang dicapai pada triwulan III ini adalah:

- Rapat terkait penyusunan rencana kegiatan dan sasaran untuk tahun anggaran 2021.
- Rapat koordinasi monitoring dan pengawasan realisasi kegiatan di lingkup Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
- Rapat FGD Program Kegiatan 2021 dan pematangan Penyusunan Renstra 2020-2024 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- Pembahasan usulan kegiatan inisiatif baru tahun 2021
- Pembahasan Akselerasi Program Pembangunan Industri Menuju Indonesia Maju.
- Rapat koordinasi pelaksanaan validasi IUI efektif pada sektor industri hasil hutan dan perkebunan.
- Rapat koordinasi pelaksanaan dan pengawasan pemberlakuan IOMKI.

Akuntabilitas keuangan untuk Output V, Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha, jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan Triwulan III dari yang ditargetkan 84,44 persen terealisasi sebesar 45,18 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 90,81 persen terealisasi sebesar 44,31 persen.

Jika dibandingkan dari segi realisasi keuangan tahun 2019 periode yang sama dari yang ditargetkan 33,24 persen terealisasi sebesar 52,82 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 62,61 persen terealisasi sebesar 34,73 persen.

6. Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Indonesia menempatkan industri atsiri sebagai industri warisan bangsa (*national heritage*) yang telah diusahakan sejak zaman kerajaan Majapahit –Sriwijaya hingga penjajahan Belanda – Jepang; dengan kemampuan produksi produk atsiri yang sangat besar dan beragam. Namun, kualitas dan kuantitas jenis industri atsiri,

khususnya industri penyulingan atsiri tidak banyak mengalami banyak perubahan karena sebagian besar unit pengolahan minyak atsiri dimiliki petani rakyat dengan teknologi sederhana/tradisional dan kapasitas produksi terbatas.

Dalam lingkungan pemasaran internasional terdapat 150 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan 40 jenis di antaranya diproduksi di Indonesia, khususnya minyak atsiri eksotis. Pasar ekspor atsiri terbesar di dunia berada di negara Perancis dimana pasokan minyak atsiri berasal dari India, Singapura, China; beberapa diantaranya transshipment dari Indonesia. Beberapa tanaman atsiri asal Indonesia yang diminati pasar ekspor dunia adalah Minyak Nilam, Sereh Wangi, Cengkeh, Jahe, Pala, Lada, Kayu Manis, Cendana, Melati, Akar Wangi, Kenanga, Kayu Putih dan Kemukus. Negara Indonesia tercatat sebagai pengeksport minyak nilam terbesar di dunia namun sebagian besar berupa produk setengah jadi/ belum produk hilir, dengan anggaran sebesar **Rp. 322.994.000,-**. Kegiatan Konsep Pengembangan Sistem Logistik Kayu Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem logistik kayu nasional yang terintegrasi:

- Koordinasi dengan stakeholder terkait baik dengan tim kegiatan di direktorat maupun dengan asosiasi minyak atsiri (Dewan Atsiri Indonesia) melalui meeting online mengenai rencana/progres kegiatan Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri.
- Telah dilakukan koordinasi dan kunjungan kerja terkait persiapan pembangunan pabrik ivo ilo di divisi manufaktur PT. Pura Barutama Kudus.

Akuntabilitas keuangan untuk Output VI, Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan triwulan III dari yang ditargetkan 68,72 persen terealisasi sebesar 28,41 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 47,40 persen terealisasi sebesar 24,40 persen.

7. Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas.

Industri pulp dan kertas nasional berjumlah 88 perusahaan, dimana 48 perusahaan merupakan industri kertas yang menggunakan kertas bekas dengan kapasitas terpasang sekitar 8.2 juta ton pada tahun 2018 dan jumlah tenaga kerja yang diserap secara langsung sekitar 40 ribu orang. Industri pulp dan kertas

merupakan industri yang strategis, dengan kontribusi terhadap total ekspor Indonesia sebesar 4% atau sekitar 7,2 milyar USD.

Industri kertas beroperasi dengan menggunakan bahan baku berupa pulp dalam negeri dan/atau luar negeri, campuran pulp dan kertas daur ulang atau seluruhnya berbahan baku kertas daur ulang. Kebutuhan kertas daur ulang (HS Code 4707.10.00.10, 4707.20.00.10, 4707.30.00.10, 4707.90.00.10) secara nasional berdasarkan kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton/tahun, namun saat ini penggunaan kertas bekas oleh industri hanya sebesar 6,4 juta ton dimana sumber kertas bekas tersebut 3,2 juta ton/tahun dapat disediakan dalam negeri, dan sisanya berasal dari impor. dengan anggaran sebesar **Rp. 317.300.000,-**. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

- Persiapan Penyusunan Pedoman Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas.
- Monitoring ke Industri terkait SOP penanganan kertas bekas sebagai bahan baku industri kertas.

Akuntabilitas keuangan untuk Output VII, Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas, jika dilihat dari segi Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 86,99 persen terealisasi sebesar 20,72 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 54,40 persen terealisasi sebesar 18,40 persen.

C. Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2020 yang telah ditetapkan, realisasi kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan TA. 2020 triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Realisasi Perjanjian Kinerja s/d Triwulan III TA. 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi
TUJUAN					
Tj	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,79	%	(26,34)*
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,38	%	2,06*
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3,3	Juta Orang	0,90*
		4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	16,25	USD Milyar	13,74*
PERSPEKTIF STAKEHOLDER					
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2,57	%	0.67*
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	51,2	Juta Rupiah/ Orang /Tahun	67,14*
		3. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	45,38	Rp Trilyun	130,48
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	2,05	%	N/A
SS3	Meningkatnya kemampuan industri hasil	1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54,75	%	N/A

	hutan dan perkebunan dalam negeri	2. Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2	Diversifikasi Produk	N/A
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1. Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	9,25	%	(2,97)*
		2. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	8,75	%	10,86*
		3. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	2,23	%	N/A
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH					
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%	100
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	77	Nilai	71,26

*Data proyeksi triwulan-III

- **Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional**

1. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan II tahun 2020 mencapai Rp2.703,1 triliun sedangkan menurut harga kostan adalah Rp2.589,6 triliun. Angka ini mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen secara year-on-year. Oleh sebab itu, pertumbuhan PDB sektor industri hasil hutan dan perkebunan diperkirakan kembali mengalami kontraksi pada triwulan III tahun 2020 dengan laju PDB yaitu (26,34) persen.
2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional sampai dengan triwulan III diperkirakan mencapai 2,06 persen.

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah sebanyak 900.322 orang tenaga kerja.
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan diperkirakan akan mencapai USD 13,74 milyar sampai dengan triwulan III tahun 2020.

- **Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan**

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja adalah sebesar 0,67 persen.
2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 51,2 juta rupiah perorang pertahun. Perkiraan realisasi pada triwulan III tahun 2020 adalah sebesar 67,14 juta rupiah per orang. Berdasarkan data dari BKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2019 sebesar 319,57 juta per orang per tahun.
3. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah sebesar Rp 130,48 trilyun.

- **Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan**

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi, pada indikator ini kami belum mendapatkan metode penghitungan yang tepat dan akurat, beserta data dan informasi yang dapat mendukung penghitungannya.

- **Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri**

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang), pada indikator ini kami belum mendapatkan data dan informasi dari sumber yang valid dan kredibel, jadi belum dapat dihitung prosentase tingkat komponen dalam negeri (N/A).
2. Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan, pada indikator ini belum dapat dihitung komoditi atau produk yang dilakukan diversifikasi, yaitu dijadwalkan pada akhir tahun 2020.

- **Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan**

1. Ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2020 sampai triwulan III diperkirakan kembali menurun secara *year-on-year*, yaitu sebesar (2,97). Dibandingkan periode triwulan sebelumnya, ekspor juga menurun sebesar (3,22) persen.
2. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor pada Triwulan III Tahun 2020 adalah sebesar 10,86 persen.
3. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas, pada indikator ini kami belum mendapatkan data dan informasi yang memadai untuk dapat menghitung rasio (N/A).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Pertumbuhan PDB sektor industri hasil hutan dan perkebunan mengalami kontraksi sehingga laju PDB melambat pada triwulan III 2020, yaitu sebesar (26,34) persen.
2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional sampai dengan triwulan III adalah sebesar 2,06 persen.
3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sampai Triwulan III Tahun 2020 adalah sebanyak 900.322 orang tenaga kerja.
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (data sampai bulan Mei) adalah sebesar USD 13,74 milyar.
5. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja adalah sebesar 0,67 persen.
6. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 51,2 juta rupiah perorang pertahun. Realisasi adalah sebesar 67,14 juta rupiah per orang. Berdasarkan data dari BKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2019 sebesar 319,57 juta per orang per tahun.

D. Hambatan dan Kendala

Dari hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan selama triwulan III tahun 2020, pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak terlepas dari kendala dan hambatan, antara lain yaitu:

1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena merebaknya pandemik Covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Revisi anggaran yang melalui aplikasi sakti dengan satu akun untuk satu satuan kerja membuat proses revisi terutama revisi internal harus dilakukan secara bergantian antara eselon II, selain itu revisi online tersebut membuat proses input revisi pada SAKTI berjalan lambat.
3. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar memberikan dampak pada aktivitas pelaksanaan kegiatan yang harus diselenggarakan di lapangan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Penyesuaian dan revisi anggaran yang sangat signifikan sebagai respon penanganan pandemic covid-19 menyebabkan adaptasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

E. Langkah dan Tindak Lanjut

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2020 langkah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan realokasi jadwal kegiatan dan menginventaris kegiatan dengan mendahulukan kegiatan utama yang terkait langsung output kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Program Setditjen Agro untuk mengatur dan membuat jadwal proses revisi antar eselon II.
3. Pada periode triwulan III tahun 2020 tidak ada aktivitas kegiatan di lapangan, kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan adalah pelaksanaan rapat secara online/video conference.
4. Dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran dengan mempertimbangkan pencapaian output yang telah ditentukan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Pertumbuhan PDB sektor industri hasil hutan dan perkebunan mengalami kontraksi sehingga laju PDB melambat pada triwulan III 2020, yaitu sebesar (26,34) persen.
2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional sampai dengan triwulan III adalah sebesar 2,06 persen.
3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sampai Triwulan III Tahun 2020 adalah sebanyak 900.322 orang tenaga kerja.
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 (data sampai bulan Agustus) adalah sebesar USD 13,74 milyar.
5. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja adalah sebesar 0,67 persen.
6. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 51,2 juta rupiah perorang pertahun. Realisasi adalah sebesar 67,14 juta rupiah per orang. Berdasarkan data dari BKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2019 sebesar 319,57 juta per orang per tahun.
7. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp **5.426.866.000,-** (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) setelah dilakukan revisi dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19.
8. Capaian kinerja triwulan III tahun 2020 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, realisasi keuangan sebesar **Rp Rp 2.121.414.490,-** atau sebesar **39,09 persen**. Sedangkan realisasi fisik mencapai **42,83 persen**.
9. Untuk capaian keuangan sebesar 39,09 persen dari target yang ditetapkan sebesar 76,99 persen sehingga berdasarkan sektor keuangan maka kinerja direktorat adalah 50,77 persen.

10. Analisis capaian indikator kinerja dapat dihitung bahwa realisasi fisik mencapai 42,83 persen dari yang ditargetkan sebesar 77,04 persen. Sehingga berdasarkan kinerja fisik, maka kinerja direktorat adalah 55,59 persen.
11. *Benefit impact* dapat dilihat bahwa kinerja fisik yang dicapai sebesar 55,59 persen dibandingkan dengan kinerja keuangan sebesar 50,77 persen, yaitu sebesar 109 persen, hal ini mencerminkan bahwa kinerja direktorat baik, yaitu capaian fisik selaras dengan capaian keuangan, walaupun secara parsial masing-masing capaian baik keuangan dan fisik belum dapat melampaui target.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Triwulan IV tahun 2020 maka perlu dilakukan langkah-langkah:

1. Menyelesaikan kegiatan yang dilakukan secara lelang, agar persyaratan administrasi sesegera mungkin untuk dilengkapi.
2. Menyelesaikan seluruh administrasi pertanggung jawaban keuangan kegiatan maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
3. Membuat rencana kerja dan rencana penarikan anggaran pada aplikasi ALKI yang lebih teratur dan diadakan rapat koordinasi diantara para koordinator kegiatan minimal dua minggu sekali untuk mensinkronkan kegiatan yang akan dikerjakan. Sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran 2020 serta antara target keuangan dan target fisik seimbang dan selaras.

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020
DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247960) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.07. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1833 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Edy Sutopo, M.Si
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53, Lt. 17
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.02.1.247960/2020

DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER

II. OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
031 Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		-	855.652	855.652		3 rekomendasi
032 SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan dan diawasi di industri hasil hutan dan perkebunan		-	1.006.394	1.006.394		15 RSNI
037 Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun/direvisi di industri hasil hutan dan perkebunan		-	662.091	662.091		2 RSKKNI/KKNI

053	Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional	-	1.055.909	1.055.909		3 Rekomendasi
056	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha	-	1.206.526	1.206.526		2 Dokumen
071	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	-	322.994	322.994		2 Konsep
072	Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas	-	317.300	317.300		1 Pedoman Teknis
Total		-	5.426.866	5.426.866		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
031 Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	33,29	32,69	51,57	16,90	36,63	12,90	30,97	8,39	69,93	45,59	82,54	25,29	DKI JAKARTA
032 SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan dan diawasi di industri hasil hutan dan perkebunan	37,75	24,57	44,44	30,89	41,64	28,07	39,62	41,28	79,39	52,63	84,06	72,18	DKI JAKARTA
037 Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun/direvisi di industri hasil hutan dan perkebunan	34,92	11,34	29,87	19,77	38,28	12,17	24,34	5,00	73,19	23,51	54,21	24,77	DKI JAKARTA
053 Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional	38,30	11,62	43,76	6,55	35,52	15,78	36,58	31,10	73,82	27,40	80,33	37,66	DKI JAKARTA
056 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha	69,52	31,88	74,58	22,53	14,92	13,30	16,24	21,79	84,44	45,19	90,81	44,32	DKI JAKARTA
071 Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	29,89	14,34	26,47	14,60	38,84	14,07	20,93	9,80	68,73	28,42	47,40	24,40	DKI JAKARTA
072 Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas	74,72	6,17	31,58	16,90	12,27	14,56	22,82	1,50	86,99	20,73	54,40	18,40	DKI JAKARTA
Jumlah	45,57	21,66	48,53	18,95	31,42	16,44	28,51	21,16	76,99	38,10	77,04	40,10	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena merebaknya pandemik Covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Revisi anggaran yang melalui aplikasi sakti dengan satu akun untuk satu satuan kerja membuat proses revisi terutama revisi internal harus dilakukan secara bergantian antara eselon II, selain itu revisi online tersebut membuat proses input revisi pada SAKTI berjalan lambat. 3. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar memberikan dampak pada aktivitas pelaksanaan kegiatan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan realokasi jadwal kegiatan dan menginventaris kegiatan dengan mendahulukan kegiatan utama yang terkait langsung output kegiatan. 2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Program Setditjen Agro untuk mengatur dan membuat jadwal proses revisi antar eselon II. 3. Pada periode triwulan IV tahun 2020 besar kemungkinan tidak ada aktivitas kegiatan di lapangan, 	-

	<p>harus diselenggarakan di lapangan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.</p> <p>4. Penyesuaian dan revisi anggaran yang sangat signifikan sebagai respon penanganan pandemic covid-19 menyebabkan adaptasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan adalah pelaksanaan rapat secara online/video conference.</p> <p>4. Dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran dengan mempertimbangkan pencapaian output yang telah ditentukan.</p>	
--	--	---	--

Jakarta Selatan, 7 Oktober 2020

Plt. Direktur
Industri, Hasil Hutan dan Perkebunan



TTD

Ir. Edy Sutopo, M.Si